Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN BUMDes (STUDI PADA BUMDes SUPERIN JAYA DESA PULAU PANJANG CERENTI)

Elky Yunanda[1],Emilia Emharis[2],Alsar Andri[3]
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl.Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab.Kuantan Singingi
email: elkynanda18@gmail.com [1] , papamarwah@gmail.com[2] ,
alsarandri50@gmail.com[3]

Abstract

The aim of this research is to explain the application of Good Corporate Governance principles to the management of BUMDes in Pulau Panjang Cerenti Village and the inhibiting factors in implementing Good Corporate Governance principles. The research method used in this research is qualitative research with a case study approach. The methods used to collect data are observation, interviews and documentation. The informants for this research came from actors in BUMDes Pulau Panjang Cerenti Village. Data analysis includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research has 5 indicators, namely transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality.

Keywords: Implementation, Governance, BUMDesa, GCG

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan penerapan prinsip Good Corporate Governance terhadap pengelolahan BUMDes Desa Pulau Panjang Cerenti dan faktor penghambat dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini berasal dari aktor yang ada di BUMDes Desa Pulau Panjang Cerenti. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memiliki 5 indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan.

Kata Kunci : Implementasi, Tata Kelola, BUMDesa,GCG

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

1. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUMDes) adalah lembaga ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat lokal. BUMDes memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di desa. Selain itu juga BUMDes berperan pada lembaga sosial yang berpihak dengan kepentingan masyarakat melalui penyediaan pelayanan sosial, sedangkan lembaga bertujuan untuk mencari keuntungan dengan melalaui penawaran sumber daya lokal. Dasar hukum untuk BUMDes di Indonesia terutama dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tepatnya pada Pasal 67 hingga Pasal 71 UU Desa mengatur mengenai BUMDes.

Meskipun tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur *good corporate governance* dalam BUMDes, prinsip-prinsip *good corporate governance* seharusnya diinternalisasikan pengelolaan BUMDes sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa BUMDes Superin Jaya merupakan lembaga usaha ekonomi desa milik Pemerintah Desa Pulau Panjang Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. BUMDes Superin Jaya didirikan pada tanggal 13 September 2019 melalui forum musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat Desa Pulau Panjang Cerenti, yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga desa lainnya, dan perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.

Pada saat ini BUMDes Superin Jaya memiliki usaha yang akan dijalankan yaitu unit usaha fotocopy dan percetakan, serta menyediakan alat tulis kantor dan sekolah. Munculnya ide untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut dilatar belakangi oleh kebutuhan administrasi kantor dan sekolah yang cukup tinggi di Desa Pulau Panjang Cerenti, dimana fotocopy dan percetakaan yang ada terletak lumayan jauh dari Desa Pulau Panjang Cerenti. Pada tahap awal usaha, dana untuk biaya investasi sebesar Rp 150.000.000,- yang sudah termasuk biaya upah pekerja didalamnya. Sementara itu keuntungan yang diperoleh dari usaha fotocopy dan percetakan, digunakan untuk pengembangan usaha, dan sebagian sisanya disetorkan ke pemerintah desa sebagai tambahan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Namun berdasarkan observasi awal peneliti diketahui bahwa pengelolaan BUMDes Superin Jaya belum optimal. Adapun fenomena-fenomena yang ditemukan adalah berkaitan dengan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Selama ini BUMDes Superin Jaya tidak transparan dalam pengelolaan BUMDes sehingga menjadi pembicaraan ditengah-tengah masyarakat di Desa Pulau Panjang Cerenti. BUMDes seharusnya memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada anggota, desa, dan pihak terkait lainnya tentang kegiatan, keuangan, dan kinerja bisnisnya. Masalah selanjutnya terdapat pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan BUMDes. Perencanaan BUMDes Superin

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Jaya didirikan tanpa melibatkan masyarakat sehingga keberadaan BUMDes Superin Jaya kurang bermanfaat bagi masyarakat di Desa Pulau Panjang Cerenti.

Permasalahan diatas tidak sejalan dengan prinsip *good corporate governance* yaitu prinsip keterbukaan informasi (*transparancy*) dan akuntabilitas (*accountability*). Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Akuntabilitas yaitu kejelasan dari fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen organisasi atau perusahaan dengan tujuan pengelolaan organisasi atau perusahaan tersebut berjalan dengan efektif. Hal tersebut juga menimbulkan permasalahan internalnya, seperti yang telah peneliti jelaskan diatas bahwa yang dapat mempengaruhi kemandirian (*independency*) BUMDes itu berasal dari pemerintah desa, termasuk kepala desa beserta perangkatnya, BPD, masyarakat, dan potensi desa, juga termasuk pendapatan desa. Hal ini menjadi tugas bagi pemerintah desa dan para pengurus BUMDes untuk menghadapi masalah tersebut. Selain itu, berdasarkan survei awal peneliti ditemukan bahwa BUMDes Superin Jaya sampai saat ini belum memberi manfaat yang signifikan bagi masyarakat maupun terhadap pendapatan asli desa (PADes) Desa Pulau Panjang Cerenti.

Dengan memahami kendala-kendala yang dihadapi dan mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip *good corporate governance* diterapkan dalam BUMDes Superin Jaya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan pedoman yang konkrit untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan BUMDes Superin Jaya. Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi di tingkat desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan model pengelolaan BUMDes Superin Jaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan mampu memberdayakan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Macam-macam unit usaha milik BUMDes Pulau Panjang di antaranya yaitu:

1. Foto copy dan percetakan
2. Perlengkapan ATK

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Superin Jaya Desa Pulau Panjang Cerenti 2 tahun belakangan tidak berlancar dengan baik dan baru berjalan dengan 1 tahun ini belakangan ini. Kemudian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pulau Panjang Cerenti terjadi permasalahan yaitu terjadinya penunggakan oleh pemanfaat dari unit usaha Perlengkapan ATK yang kurang transparansi sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan dari BUMDes Superin Jaya Desa Pulau Panjang.

Tabel.1.1 Data BUMDes Superin Jaya Desa Pulau Panjang Cerenti Unit Usaha Fotocopy dan Percetakan, dan Pelengkapan ATK.

Keterangan	Modal Awal	Pendapatan		
		2021	2022	2023

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Fotocopy, Percetakan, dan Perlengkapan ATK	Rp.150.000.000	Rp.2.141.000	Rp.36.051.000	Rp.6.462.000

Sumber : BUMDes Superin Jaya Pulau Panjang Cerenti

Dapat dilihat dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Kelembagaan BUMDes Superin Jaya di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi mengalami permasalahan dan belum terealisasi dengan baik sehingga dari permasalahan diatas, maka diperlukan suatu penelitian yaitu tentang Berdasarkan uraian diatas, penting untuk mencari tahu dan menganalisis penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan BUMDes Superin Jaya dan faktor-faktor penghambat dalam penerepan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/konsep Administrasi Negara

Ilmu administrasi adalah salah satu perhatian dan pemikiran menjadi bidang kajian utama untuk mempelajari proses kerja sama manusia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efesien dan efektif dengan menggunakan instrument pengaturan sehingga melahirkan keteraturan berfikir dan bertindak.

Menurut Atmosudirojo (2000:26) administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksitensi dari pada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat di dalam suatu organisasi. Jadi barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu rganisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi.

2.1.2 Teori/Konsep *Good Corporate Governance*

Good corporate governance didefinisikan oleh Komite Cadbury sebagai sistem untuk memfokuskan dan menuntun perusahaan dengan tujuan mencapai keseimbangan antara kekuatan wewenang yang diperlukan oleh perusahaan supaya menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada stakeholders (dalam Sudarmanto, 2021:50).

Good corporate governance yang dikemukakan oleh *organization economic cooperation and development* (OECD) yaitu keterbukaan informasi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Akuntabilitas menjelaskan peran dan tanggung jawab serta mendukung usaha

untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan Pemegang Saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam *two tiers system*).

2.1.3 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Surasih (2002:23) pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. pemerintah desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa.

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 26 tentang tugas pokok kepala desa yaitu :

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
b. Pemberdayaan masyarakat
c. Pelayanan masyarakat
d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

2.1.4 Teori/Konsep Pengelolaan BUMDes

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan BUMDes adalah suatu jenis badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya di miliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang bersal dari hasil kekayaan dan potensi desa lembaga ini di prediksi menjadi kekuatan besar yang akan mendorong terciptanya peningkatan kesejahtraan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menciptakan produtifitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada potensi yang dimiliki desa (dalam Suleman, 2020:42).

Menurut Nugroho (2020:14) BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumber daya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

2.1.5 Teori/Konsep Implementasi

Menurut Pressman dan Widavsky (dalam Pramono. 2022 : 1) Implementasi merupakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi dapat berdiri sendiri sebagai kata kerja dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya berkaitan dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu Lembaga atau badan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya dengan kata benda bijaksanaan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Pramono. 2022 : 3) mendefinisikan implementasi kebujakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan oprasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian survei dan menggunakan tingkat eksplanasi deskriptif dan analisa data kualitatif.Penelitian survei adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau suatu individu (Nazir, 2015:11).

Penelitian survei ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Singarimbun (2008:4) penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomenal sosial tertentu, dan mengembangkan konsep serta menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terhadap pengelolahan BUMDes Desa Pulau Panjang Cerenti dan faktor penghambat dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini berasal dari aktor yang ada di BUMDes Desa Pulau Panjang Cerenti. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memiliki 5 indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan.

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, baik melalui wawancara dan pengamatan langsung maka dapat diperoleh berbagai data dan informasi dari informan yang berjumlah 10 orang dalam kaitannya dengan Analisis Penerapan Prinsip Good *Corporate Governance* Dalam Pengelolaan BUMDes (Studi Pada BUMDes Superin Jaya Desa Pulau Panjang Cerenti). Dan adapun hasil wawancara langsung kepada pihak yang terkait dengan Analisis Penerapan Prinsip Good *Corporate Governance* Dalam Pengelolaan BUMDes (Studi Pada BUMDes Superin Jaya Desa Pulau Panjang Cerenti) untuk mendapatan gambaran mengenai responden, berikut di deskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.

Analisis Penerapan Prinsip Good *Corporate Governance* Dalam Pengelolaan BUMDes (Studi Pada BUMDes Superin Jaya Desa Pulau Panjang Cerenti) mengenai indikator *Transparansi. Transparansi* adalah mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan, informasi tersebut mudah diakses oleh

pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Berdasarkan analisa peneliti dari hasil wawancara di lapangan tentang keterbukaan laporan keuangan Bumdes Superin Jaya kurang terbuka, karena pemerintah desa tidak sepenuh nya mengetahui tentang keungan Bumdes Superin Jaya, seperti laporan hasil usaha dan laporan arus kas, dan masyarakat hanya mengetahui jenis-jenis usaha yang ada di Bumdes Superin Jaya sedangkan tentang keuangan masyarakat sama sekali tidak mengetahui hal tersebut karena yang mengetahui tentang keuangan Bumdes hanya karyawan Bumdes saja.

Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Bumdes Superin Jaya belum cukup baik karena pada BUMDes tersebut terlihat jelas dari pendapatan yang didapat kan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun penyebab dari hal tersebut salah satunya dalam perekrutan karyawan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut penulis sebaiknya karyawan BUMDes diambil dari masyarakat desa nya sendiri agar meminimalisir tingkat pengangguran yang ada didesa Pulau Panjang Cerenti.

Dengan demikian, untuk indikator Transparansi tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan informan secara langsung dan analisa peneliti di lapangan, keterbukaan laporan keuangan BUMDes Superin Jaya kurang terbuka, karena pemerintah desa tidak sepenuhnya mengetahui tentang keuangan BUMDes Superin Jaya, seperti laporan hasil usaha dan laporan alur kas, dan masyarakat hanya mengetahu jenis-jenis usaha yang ada di BUMDes Superin Jaya sedangkan tentang keuangan masyarakat sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Sedangkan pengelola, pengawasan dan pengendalian BUMDes Superin Jaya belum cukup baik terlihat jelas pada pendapatan yang didapatkan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Salah satu penyebabnya yaitu perekrutan karyawan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sebaiknya, karyawan BUMDes Superin Jaya diambil dari masyarakat desa nya sendiri agar dapat meminimalisir tingkat pengangguran yang ada didesa Pulau Panjang Cerenti. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator ini belum berjalan dengan baik.

Indikator Akuntabilitas tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan informasi secara langsung dan analisa peneliti dilapangan, peran dan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen pada BumDes Superin Jaya yaitu Berbeda dengan yang dilihat oleh peneliti dilapangan berdasarkan beberapa wawancara dengan informan di atas terlihat sudah baik, sedangkan yang penulis lihat dilapangan masih banyak kekurangan pada pelayanan yang diberikan oleh BumDes superin jaya kepada masyarakat seperti kurangnya kedisiplinan karyawan, sedangkan laporan tahunan BUMDes Superin Jaya yaitu sama dengan yang dilihat oleh peneliti dilapangan berdasarkan beberapa wawancara dengan informan di atas terlihat kurang baik, karena karyawan BUMDes Superin Jaya tidak berperan baik dan tidak bertanggung jawab dalam mendukung usaha pada BUMDes Superin Jaya, contohnya pada laporan tahunan yang tidak diterima oleh Pemerintah Desa dan tidak terbukanya Laporan tahunan terhadap masyarakat yang hanya mengetahui tentang usahanya saja. Sehingga indikator akuntabilitas dapat dikatakan belum berjalan dengan baik.

Analisis Penerapan Prinsip Good *Corporate Governance* Dalam Pengelolaan BUMDes (Studi Pada BUMDes Superin Jaya Desa Pulau Panjang Cerenti) mengenai indikator Kesetaraan dan Kewajaran. Kesetaraan dan Kewajaran menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. Dalam melaksanakan kegiatannya, upaya adil, kewajaran dan kesetaraan perlu ditekankan dalam memenuhi hak-hak maupun kewajiban dari *stakeholder* yang berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan data pembahasan peneliti serta penjabaran dari masing-masing dimensi teori yang digunakan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan BUMDes Superin Jaya Desa Pulau Panjang Cerenti belum berjalan dengan baik. Transparansi di BUMDes Superin Jaya desa Pulau Panjang Cerenti belum berjalan dengan baik, dikarenakan kurang keterbukaan laporan keuangan BUMDes Superin Jaya. Dan pengelolaan BUMDes belum cukup baik terlihat pada pendapatan yang didapatkan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Analisis Akuntabilitas pada BUMDes Superin Jaya desa Pulau Panjang Cerenti belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih banyak kekurangan pada pelayanan yang diberikan oleh BumDes superin jaya kepada masyarakat seperti kurangnya kedisiplinan karyawan, sedangkan laporan tahunan BUMDes Superin Jaya yaitu sama dengan yang dilihat oleh peneliti dilapangan berdasarkan beberapa wawancara dengan informan di atas terlihat kurang baik, karena karyawan BUMDes Superin Jaya tidak berperan baik dan tidak bertanggung jawab dalam mendukung usaha pada BUMDes Superin Jaya, contohnya pada laporan tahunan yang tidak diterima oleh Pemerintah Desa dan tidak terbukanya Laporan tahunan terhadap masyarakat yang hanya mengetahui tentang usahanya saja.

Analisis Kemandirian pada BUMDes Superin Jaya desa Pulau Panjang Cerenti sudah berjalan cukup baik, dilihat dari tidak adanya investasi dari luar, karena pengurus BUMDes mampu mengenbangkan modal yang diberikan oleh pemerintah desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimah kasih yang tiada henti kepada kedua orang tua penulis Ayah dan Ibu serta saudara dan saudari penulis yang telah memberi semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menimbah ilmu, ucapan terimah kasih kepada ibuk Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, ibuk Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, bapak Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, bapak Emilia emharis s,sos MSI selaku dosen pembimbing I penulis, bapak Alsar Andri, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II penulis, bapak dan ibuk dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta teman-teman seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin, 2012. *Pengantar Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Ali, 2015. *Teori dan Konsep Administrasi Dari Paradigma Pardigmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta:Rajawali.

Atmosudirjo, 2000. *Administrasi Manajemen Umum.* Jakarta: CV Mas Haji.

Bungin, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

Iskandar, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.

Kusmayadi, 2015. *Good Corporate. Governance (I. Firmansyah (Ed.)*. Siliwangi: LPPM Universitas Siliwangi.

Meoleong, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Cetakan Ke-36*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Miles, 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3 Terjemahan Rohindi Rohidi.* Jakarta: UI Press.

Nasrum, 2015. *CORPORATE GOVERNANCE (Konsep, Teori dan Aplikasi di Beberapa Negara Asia)*. Maros: Pustaka Salewangang.

Nazir, 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugroho, 2020. *Badan Usaha Milik Desa : Pembukuan Keuangan BUMDes.* Jakarta:PT Elex Media Kopmutindo.

Pasolong, 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.

Rohman, 2018. *Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa : Menuju Pengelolaan Desa Yang Tertib Dan Akuntabel.* Malang: Intelegensia Media.